

Perencanaan Keuangan Pendidikan di Lembaga Pendidikan Royatul Qur'an Batam

M. Nurman Ardiansyah*, Endin Mujahidin, Nesia Andriana

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*mnurmanardiansyah@gmail.com

Abstrak

Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam terselenggaranya kegiatan pendidikan adalah faktor keuangan. Tata kelola keuangan yang baik, akan berdampak baik pula bagi terselenggaranya kegiatan pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan tentunya diawali dengan perencanaan yang matang. Perencanaan keuangan pendidikan menjadi hal yang penting agar penyelenggaraan pendidikan dapat dijalankan secara maksimal serta dapat mencapai tujuan-tujuannya sebagaimana yang telah dicanangkan sesuai visi-misi dari pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan keuangan pendidikan di lembaga pendidikan Royatul Qur'an Batam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan keuangan pendidikan di lembaga pendidikan Royatul Qur'an Batam yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyusun anggaran dan pembiayaan terkait penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan tujuan penyelenggaraannya.

Kata Kunci: Perencanaan, Keuangan, Pendidikan

Abstract

One of the supporting factors for success in the implementation of educational activities is the financial factor. Good financial governance will also have a good impact on the implementation of educational activities as expected by an educational institution. Good financial governance in the administration of education certainly begins with careful planning. Educational financial planning is important so that the implementation of education can be carried out optimally and can achieve

its goals as stated in accordance with the vision and mission of the educational institution. The purpose of this study was to determine educational financial planning at the Royal Qur'an Batam educational institution. This research is a qualitative research with a literature study and field study approach. The results of the study show that in educational financial planning at the Royatul Qur'an Batam educational institution what needs to be considered is how to prepare the budget and financing related to the implementation of educational activities that are effective, efficient, transparent and accountable so that the implementation of educational activities can run well and optimally in accordance with the objectives maintenance.

Keywords: *Planning, Finance, Education*

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, pada pasal 48 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit menyatakan bahwa, dalam mengelola dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam terselenggaranya kegiatan pendidikan adalah faktor keuangan. Secara eksplisit keuangan pendidikan termaktub dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang delapan standar nasional pendidikan, yakni yang terdiri salah satunya adalah standar pembiayaan.

Tata kelola keuangan yang baik dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas akan berdampak baik bagi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Demikian halnya yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Royatul Qur'an Batam dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan pendidikan, senantiasa

berpedoman pada tata kelola keuangan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.

Apa yang menjadi prioritas dalam rencana penganggaran dan pembiayaan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan Royatul Qur'an Batam, dilakukan dengan cermat dan teliti. Hal ini dilakukan guna menghindari penganggaran dan pembiayaan yang tidak tepat yang berdampak tidak adanya efisiensi.

Menurut Nursalimah, faktor penting yang berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi modal dalam meningkatkan perekonomian, intelektual, dan karakter bangsa. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang baik, diperlukan strategi dan upaya di antaranya masalah efisiensi dan efektivitas pendidikan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan terkait efisiensi dan efektivitas pendidikan adalah mengenai pembiayaan (Nursalimah, 2017).

Perencanaan keuangan pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam mengawali terselenggaranya kegiatan pendidikan, terkait berbagai pembiayaan-pembiayaan yang diperlukan, dari hal-hal kecil hingga yang paling besar. Keuangan pendidikan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan seperti misalnya: peningkatan proses belajar mengajar, pemeliharaan, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan profesional guru, administrasi sekolah, dan juga kesejahteraan pegawai.

Perencanaan keuangan adalah hal yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberlangsungan terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Bagaimana menetapkan perencanaan keuangan demi keberlangsungan suatu penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang baik, merencanakan tata kelola keuangan pendidikan merupakan hal yang benar-benar menjadi prioritas utama sebelum memulai suatu penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Tanpa adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, hal itu akan berdampak pada keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, dan hal itu tentunya juga akan berdampak pada capaian atau tujuan-tujuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Terkait hal tersebut di atas, perencanaan keuangan pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang lebih baik, sehingga dengan itu pula tujuan dari penyelenggaraan pendidikan itu secara beriringan akan dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan studi lapangan. Sebagaimana dikemukakan Sukmadinata, penelitian kualitatif dikenal dengan penelitian analisis, yaitu penelitian yang mengkaji berdasarkan analisis dokumen. Penulis menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, mengadakan sintesis data, kemudian memberi interpretasi terhadap konsep (Sukmadinata N. S., 2007).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan bertumpu pada data kepustakaan/studi literatur. Sebagaimana dikemukakan Muhadjir, studi pustaka di sini adalah studi teks yang seluruh substansinya diolah secara filosofis dan teoritis (Muhadjir, 1996). Sedangkan studi lapangan dilakukan di Lembaga Pendidikan Royatul Qur'an Batam.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah Buku-buku, Jurnal, Dokumen, dan Literatur yang terkait dengan Perencanaan Keuangan Pendidikan. Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan Muslim, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif dan analisis interpretasi yang merupakan analisis sistematis mengenai aksi sosial, melihat fakta sebagai sesuatu hal yang cair dan tidak kaku yang bermakna melalui observasi manusia secara terperinci dan langsung dalam latar ilmiah, supaya bisa memperoleh pemahaman dan interpretasi sebagai esensi dalam memahami makna sosial (Muslim, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan memiliki peranan strategis dalam mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah dicanangkan. Keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan berperan strategis dalam mencapai tujuan, visi

dan misi sekolah. Sebagaimana dikemukakan Yati, seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan terkait biaya-biaya operasional sangat bergantung pada keuangan pada lembaga pendidikan selaku penyelenggara kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu, di dalam pengelolaan keuangan diperlukan sistem tata kelola keuangan yang baik untuk mencapai tujuan sekolah yang efektif dan efisien serta dapat meminimalisir berbagai kendala yang ada (Yati, 2021).

Sebagaimana dikemukakan Dilla, langkah-langkah dalam perencanaan keuangan dikatakan sebagai serangkaian kegiatan pengaturan keuangan lembaga pendidikan yang dilanjutkan pada pemetaan anggaran dan biaya, pembukuan, pengeluaran, pemantauan/pengawasan dan pertanggungjawaban, agar lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berkualitas baik secara efektif dan efisien (Dilla, 2019).

Perencanaan keuangan berkaitan dengan tata cara bagaimana lembaga pendidikan selaku penyelenggara kegiatan pendidikan memperoleh sumber dana pendidikan dan pengelolaan keuangan agar berjalan secara efektif dan efisien demi tercapai tujuan dan visi-misi yang diemban. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan memerlukan dana untuk terselenggaranya kegiatan pendidikan. Keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan terselenggaranya kegiatan pendidikan.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

1. Transparansi.

Dalam pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan di perlukan adanya keterbukaan. Keterbukaan yang berkaitan dengan sumber-sumber dana, jumlah dana yang dikelola, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Keterbukaan akan menumbuhkan kepercayaan dari stakeholders lembaga penyelenggara pendidikan seperti: pemerintah, masyarakat luas, serta orang tua siswa/wali murid, serta unsur-unsur lainnya.

2. Akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat merupakan penggunaan dana penyelenggara kegiatan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pertanggung jawaban dana lembaga pendidikan dapat ditunjukkan bagi stakeholders terkait.

3. Efektivitas.

Pengelolaan keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Waktu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan akan menjadi lebih hemat.

4. Efisiensi.

Sebagai dampak lain atas tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pendidikan adalah adanya hemat biaya, karena ketepatan pengalokasian dana dan pembiayaan. Mengurangi dampak buruk yang dimungkinkan terjadi apabila tata kelola keuangan berjalan tidak sebagai mana mestinya.

A. PENGALOKASIAN ANGGARAN (budgeting).

Sebagaimana dikemukakan Fattah, proses penyusunan anggaran (budgeting) merupakan rencana penyusunan anggaran atas kegiatan dan hal-hal lain terkait dengan pendanaan dan pembiayaan dalam kurun waktu tertentu. (Fattah, 2000).

1. FUNGSI PENYUSUNAN ANGGARAN.

Fattah mengemukakan, di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian dalam tata kelola keuangan, penyusunan anggaran juga berfungsi sebagai alat bantu dalam sistem manajemen untuk memberikan arahan dan kebijakan sekaligus mengindikasikan bahwa suatu lembaga dalam posisi kuat atau lemah. (Fattah, 2000).

Sementara, Nordiawan menerangkan bahwa fungsi anggaran dalam sistem manajemen organisasi sektor publik memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

a. Sebagai alat perencanaan

Dengan fungsi ini, lembaga penyelenggara pendidikan akan tahu apa yang seharusnya dilakukan dan dikarjakan, serta ke arah mana kebijakan diarahkan.

b. Sebagai alat pengendalian

Pada lembaga penyelenggara pendidikan dan lembaga sektor publik lainnya, fungsi penyusunan anggaran dapat menghindari terjadinya

pengeluaran biaya yang tidak semestinya (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak selayaknya (*misspending*).

c. Sebagai alat kebijakan.

Penyelenggara kegiatan pendidikan serta organisasi sektor publik lainnya dapat menentukan arah kebijakan yang tepat dan lebih baik.

d. Sebagai alat politik.

Penyusunan anggaran menjadi sebuah indikasi atas adanya komitmen pengelolaan dan pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan dan untuk dapat diselesaikan.

e. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Dapat menjadi sarana untuk mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan oleh bagian-bagian dalam organisasi penyelenggara pendidikan.

f. Sebagai penilaian kerja.

Fungsi penyusunan anggaran lainnya adalah sebagai indikator yang dapat menjadi ukuran, apakah suatu bagian dalam lembaga penyelenggara pendidikan telah mencapai sasaran dengan terlaksananya berbagai kegiatan sesuai perencanaan anggaran dan biaya yang telah disusun.

g. Sebagai alat motivasi

Fungsi lainnya dalam penyusunan anggaran adalah bahwa ia menjadi alat komunikasi yang dapat difahami dengan melihat angka-angka yang tertera sebagai target pencapaian. (Nordiawan, 2006)

2. PRINSIP-PRINSIP DAN PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN.

Menurut Fattah, prinsip-prinsip penyusunan anggaran bila dikaitkan dengan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian adalah sbagai berikut:

- Menentukan otoritas dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen lembaga penyelenggara pendidikan.
- Sistem akuntansi yang memadai dalam menentukan dan melaksanakan penyusunan anggaran.

- Penelitian dan analisis untuk menilai kinerja lembaga penyelenggara pendidikan.
- Dukungan pada pelaksana, dari tingkat atas hingga tingkat paling bawah. (Fattah, 2000)

Sedangkan, apabila prinsip-prinsip anggaran dikaitkan dengan peran dan fungsi anggaran sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara pendidikan maupun organisasi publik dan pemerintah adalah seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan yaitu;

- Kewenangan dan tanggung jawab oleh legislative.
- Utuh dan menyeluruh.

Kebutuhan.

- Jumlah yang disetujui legislative harus dapat digunakan dalam fungsinya yang lekat secara ekonomis.
- Berjangka waktu.
- Tepat.
- Jelas.
- Transparan.

Sementara prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut;

- Penentuan kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu periode anggaran.
- Identifikasi sumber-sumber anggaran.
- Semua sumber anggaran dinyatakan dalam bentuk uang.
- Formulasi anggaran dalam bentuk format yang dapat dipahami secara umum (disetujui).
- Membuat usulan anggaran untuk dapat disetujui pihak yang memiliki otoritas. .
- Melakukan revisi ulang anggaran.
- Persetujuan revisi ulang anggaran
- Pengesahan anggaran.

3. BENTUK- BENTUK ANGGARAN.

a. Anggaran butir-per butir (line item budget).

Merupakan bentuk anggaran konvensional, paling simple dan banyak digunakan. Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atau jenis butir, misalnya honor menjadi satu kategori atau satu honor/butir, sedangkan perlengkapan, sarana, material dalam butir tersendiri.

Kelebihannya adalah: lebih sederhana serta mudah dalam pengawasan pengeluaran biaya. Sedangkan kelemahannya: tidak membantu dalam pengambilan keputusan, seperti mengevaluasi harga (unit cost) dalam hubungannya dengan mencapai suatu program. Kemudian tidak dapat menunjukkan hubungan antara masukkan program dengan keluaran. Selanjutnya tidak dapat menganalisis untung rugi (cost benefit analisis), serta lebih fokus pada pembukuan namun kurang/tidak dalam hal tujuan suatu program.

b. Anggaran program (program budget system)

Bentuk-bentuk anggaran program antara lain:

- Mengorganisasikan sejumlah besar pengeluaran menjadi rencana yang logis dan konkrit.
- Merangsang rencana tahunan dan reevaluasi periodik dan pelaksanaan rencana.
- Menghindari sentralisasi berlebihan, di mana keputusan menumpuk di tingkat atas.

c. Anggaran berdasarkan kinerja (performance-based budget).

Bentuk anggaran ini menuntut akuntansi yang teliti dan proses data yang akurat. Hal ini mengakibatkan sistem seperti ini menjadi mahal.

B. PEMBIAYAAN

Sebagaimana dikemukakan Fattah bahwa pembiayaan merupakan hal penting dalam menentukan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan. Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan secara garis besar terdiri atas biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung di antaranya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian peralatan dan

perlengkapan pembelajaran, sarana prasarana, honor, dan biaya-biaya lain. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan pengeluaran yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, akan tetapi memungkinkan proses kegiatan tersebut berlangsung. (Fattah, 2000)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 pasal 62 disebutkan bahwa biaya pendidikan terdiri atas:

1. Biaya investasi satuan pendidikan.

Meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

2. Biaya personal.

Meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

3. Biaya operasional satuan pendidikan

Meliputi: honor pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada honor, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Stanley J. Spanbauer, dalam (Dadang Suhardan, 2012) menyatakan bahwa ada tujuh unsur dalam menegakkan mutu pendidikan yang harus dibiayai, yaitu:

1. *Human Resources*

2. *Curriculum and Instruction*

3. *Goal setting (standard of excellence for desing and implementation of operation)*

4. *Technology (standard Technology for used)*

5. *Marketing*


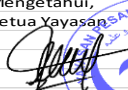

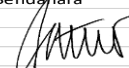
6. *Customers Service*

7. *Management (providing leadership of the quality improvement)*

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan merupakan instrumen penting dalam pencapaian tujuan, sebagus dan sehebat apapun program pendidikan itu tanpa konsep perencanaan pembiayaan yang matang, maka

Perencanaan Keuangan Pendidikan
di Lembaga Pendidikan Royatul Qur'an Batam

program tersebut sulit untuk dapat direalisasikan. Kalaupun terealisasi, maka hanya akan menimbulkan keborosan biaya.

 YAYASAN PESANTREN ROYATUL QUR'AN BATAM Jln. Kavling bukit kambaoka blok s no 55-56, kel. Sungai pelunggut, kec. Sagulung batam No. AHU-00122002.AH.01.12 Tahun 2017 Akta Notaris : Bambang PurwantoSH,Mkn				
LAPORAN KEUANGAN BULAN OKTOBER				
NO	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	SPP Kelas 7 bulan Juli 26 anak @ 1.100.000	Rp 28.600.000		Rp 28.600.000
2	SPP Kelas 8 bulan Juli 27 anak @ 1.075.000	Rp 29.025.000		Rp 57.625.000
3	SPP Kelas 9 bulan Juli 27 anak @ 1.050.000	Rp 28.350.000		Rp 85.975.000
4	SPP Kelas 10 bulan Juli 8 anak @ 1.100.000	Rp 8.800.000		Rp 94.775.000
5	Beras 25kg 21 karung @295.000		Rp 6.195.000	Rp 88.580.000
6	Telur 5 ikat @215.000		Rp 1.075.000	Rp 87.505.000
7	Minyak 4dirgen @290.000		Rp 1.160.000	Rp 86.345.000
8	Tepung 15kg @10.500		Rp 157.500	Rp 86.187.500
9	Gula Pasir 30kg @11.500		Rp 345.000	Rp 85.842.500
10	Tahu 3ember @175.000		Rp 525.000	Rp 85.317.500
11	Tempe 540bks @1.800		Rp 972.000	Rp 84.345.500
12	Sosis 40bks @31.000		Rp 1.240.000	Rp 83.105.500
13	Nugget 30bks @34.000		Rp 1.020.000	Rp 82.085.500
14	Bakso Ayam 60bks @5.000		Rp 300.000	Rp 81.785.500
15	mie Telur 6dus @36.000		Rp 216.000	Rp 81.569.500
16	bihun 3dus @38.000		Rp 114.000	Rp 81.455.500
17	Ayam potong 30kg @30.000		Rp 900.000	Rp 80.555.500
18	Bawang merah 3krng @65.000		Rp 195.000	Rp 80.360.500
19	Bawang Putih 3krng @75.000		Rp 225.000	Rp 80.135.500
20	kentang 2krng @65.000		Rp 130.000	Rp 80.005.500
21	Wortel 3dus @75.000		Rp 225.000	Rp 79.780.500
22	Cabai merah 6kg @85.000		Rp 510.000	Rp 79.270.500
23	Cabai rawit 1kg @95.000		Rp 95.000	Rp 79.175.500
24	Gas 20tbung @18.000		Rp 360.000	Rp 78.815.500
25	Air galon 180glon @5.000		Rp 900.000	Rp 77.915.500
26	Sayur segar perpekan 300.000		Rp 900.000	Rp 77.015.500
27	Tiket kedatangan 7musyirifrah + 1pendamping @1.800.000		Rp 14.400.000	Rp 62.615.500
28	Pengadaan 30kursi @270.000		Rp 8.100.000	Rp 54.515.500
29	ATK &FC		Rp 2.300.000	Rp 52.215.500
30	Infak ke RTQ Ummu Khodijah		Rp 1.000.000	Rp 51.215.500
31	Infak Ke ma'had Azali		Rp 1.500.000	Rp 49.715.500
32	Laundry		Rp 2.900.000	Rp 46.815.500
33	Air ATB		Rp 1.037.000	Rp 45.778.500
34	Listrik		Rp 1.157.000	Rp 44.621.500
MUKAFA'AH				
35	Pak Didik		Rp 1.200.000	Rp 43.421.500
36	Nazilatur Rohman		Rp 1.500.000	Rp 41.921.500
37	Aris		Rp 2.000.000	Rp 39.921.500
38	Ustadz Firdaus		Rp 1.500.000	Rp 38.421.500
39	Ustadz Nurrohim		Rp 2.500.000	Rp 35.921.500
40	Ustadz Ahmadi		Rp 800.000	Rp 35.121.500
41	Ustadz Sueb		Rp 1.200.000	Rp 33.921.500
42	Ustadz Ilham		Rp 2.000.000	Rp 31.921.500
43	Ustadz Abduh		Rp 600.000	Rp 31.321.500
44	Andi		Rp 600.000	Rp 30.721.500
45	Ustadzah Elsi		Rp 2.200.000	Rp 28.521.500
46	Ustadzah Alma		Rp 500.000	Rp 28.021.500
47	Ustadzah Rita		Rp 300.000	Rp 27.721.500
48	Ustadzah Yulia		Rp 300.000	Rp 27.421.500
49	Ustadzah Olla		Rp 300.000	Rp 27.121.500
50	Ustadzah Usna		Rp 500.000	Rp 26.621.500
51	Ustadzah Elia		Rp 500.000	Rp 26.121.500
52	Ustadzah Nurbaya		Rp 500.000	Rp 25.621.500
53	Uwa' Dapur		Rp 2.000.000	Rp 23.621.500
54	ibu Dapur		Rp 1.500.000	Rp 22.121.500
56	Ibu Kantin		Rp 1.500.000	Rp 20.621.500
TOTAL		Rp 94.775.000	Rp 74.153.500	Rp 20.621.500
Mengetahui, Ketua Yayasan				
 FATIAH				
				
			Batam, 10 November 2022	
			Bendahara	
			 NAZILATUR ROHMAN P.N.	

IV. KESIMPULAN

Perencanaan keuangan pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Perencanaan keuangan pendidikan berperan strategis dalam mencapai visi-misi lembaga pendidikan. Seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan seperti pemenuhan kebutuhan peserta didik, pemenuhan sarana dan prasarana, serta kegiatan maupun aktifitas lainnya dapat terselenggara dengan baik melalui tata kelola keuangan yang baik, oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Perencanaan keuangan pendidikan, menjadi langkah awal dalam tata kelola keuangan pendidikan agar lembaga pendidikan dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan baik, berjalan efektif dan efisien serta dapat meminimalisir berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan dalam kaitannya dengan keuangan pendidikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Suhardan, Ridawan Dan Enas. (2012). *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Deddi, Nordiawan, (2006). *akuntansi sector public*, Jakarta: salemba empat.
- Dedi Supriyadi, (2003), *Satuan Biaya Pendidikan, Dasar dan Menengah*, Cetakan Pertama, Cv. Rosda Karya, Bandung.
- Dilla, R. F. (2019). *Manajemen Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Wealth Management: Studi Di Tk Ceria Demangan Baru Yogyakarta. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2).
- Muhadjir, N. (1996). *Metode Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muslim. (2015). *Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi. Newman, W L., Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approache, Boston: Allyn & Bacon, 1997.- sebagaimana dikutip Muslim dala Jurnal Wahana, Vol 1, (No. 10), 78.*

- Fattah, Nanang, (2000). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*, Rosda, bandung.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:: PT. Remaja Rosdakarya.
- Yati, R. (2021). Peran Manajemen Keuangan Sekolah Di Dalam Pendidikan. *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat*.